

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

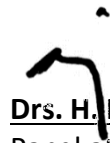
Alhamdulillah. Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Pemerintah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat disusun.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2021, telah menjalankan kewenangan kegiatannya sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai. Bahan Laporan ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Terimakasih kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang berharga bagi pihak yang berkepentingan..

Watansoppeng, Januari 2022

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng**



Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680102 199603 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Program dan Kegiatan.....	1
B. Faktor-Faktor yang terkait Kinerja.....	15
Bab II. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	17
Bab III. Penutup	33
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran.....	33

NOTULEN RAPAT

Agenda : Pertemuan dalam rangka evaluasi Internal Triwulan IV
Tahun 2021

Hari/Tanggal : Kamis/13 Januari 2022

Waktu Rapat : 08.30 Wita s.d selesai

Tempat : Ruang Pertemuan

Peserta Rapat : - Sekretaris dan Para Kabid(Mewakili)
-Kasubag Perencanaan bersama staf

Kegiatan Rapat :

I. Kata Pembukaan :

Acara dibuka oleh yang mewakili Sekretaris BPKPD pada pukul 11.00 Wita

II. Pembahasan :

- Pencapaian realisasi keuangan pada BPKPD Kab. Soppeng menunjukkan angka 95,31% (sangat Tinggi)
- Pencapaian realisasi fisik pada BPKPD Kab. Soppeng menunjukkan angka 96,13 (santa Tinggi)
- Hasil pengukuran kinerja Triwulan IV yang telah diukur sebelumnya akanj menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian reward and punishment yang telah di wujudkan dalam Surat Keputusan Bupati Soppeng
- Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam penilaian kinerja serta motivasi bagi apparat agar dapat berkinerja lebih baik pada tahun-tahun berikutnya
- Penutup :

Rapat ditutup oleh pada pukul 13.00 Wita

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipedomani dan bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

NOTULEN,

ANDI NUR UMaya
NIP. 19811006 2009 01 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jln.Salotungo No. 3 Telp. (0484) 21066 Watansoppeng 90812

BERITA ACARA
EVALUASI INTERNAL REALISASI KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2021

Pada hari ini Kamis, 13 Januari 2022 bertempat di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. DIPA.,M.Si

NIP : 19680102 199603 1 005

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 26/BPKPD/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, tersebut dibawah ini

Nama : LIES UTINI., S.E.,M.Si

NIP : 19690825 199312 2 002

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Hasil Rapat tentang Evaluasi Internal Triwulan IV maka Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Triwulan IV tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan 4 (empat) Program, Kegiatan sebanyak 13 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan. Jumlah anggaran Belanja Langsung sebanyak Rp. 145.519.073.418.00,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 138.481.157.650.00,-

Adapun realisasi setiap Sub Kegiatan terlampir pada Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

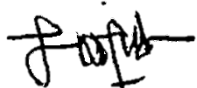
Watansoppeng, Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG


Drs. H. D. PA, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. : 19680102 199603 1 005

SEKRETARIS,



LIES UTINI, SE., M.Si

Pangkat : Pembina
NIP : 19690825 199312 2 002

BAB I**PENDAHULUAN****A. Program dan Kegiatan**

Adapun dalam pelaksanaannya secara umum kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sudah sesuai target kinerja yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA 2021), baik dilihat dari sisi pengelolaan keuangan bidang pendapatan maupun belanjanya. Berdasarkan Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA Tahun 2021) maka Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan dengan 8 (delapan) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.20.258.687.302,- dapat terealisasi sebesar Rp. 18.721.578.633,- atau 92.41% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Daerah yang sesuai regulasi. Jumlah Anggaran Rp.45.860.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.44.953.700,- atau 98.02% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.7.795.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.187.900,- atau 92.21%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 10 dokumen (Ranwal Renja, Rankhir Renja, Pengesahan Renja, Ranwal Renstra, Rankhir Renstra, Pengesahan Renstra, KUA-PPAS Pokok, KUA PPAS Perubahan, Rencana Aksi Pokok, dan Rencana Aksi Perubahan)
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen RKA yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.12.955.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

- Rp12.919.650,- atau 99.73%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 1 dokumen (Dokumen RKA)
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.13.310.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.200.000,- atau 99.17%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 1 dokumen (Dokumen RKA Perubahan)
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.11.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.646.150,- atau 98.70%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 9 dokumen (LKj, LPPD, Pengukuran Kinerja Triwulan I, Pengukuran Kinerja Triwulan II, Pengukuran Kinerja Triwulan III, Pengukuran Kinerja Triwulan IV, Evaluasi rencana Aksi Triwulan I, Evaluasi rencana Aksi Triwulan II, Evaluasi rencana Aksi Triwulan III, Evaluasi rencana Aksi Triwulan IV)
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan. Jumlah Anggaran Rp.10.972.957.440,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.999.693.875,- atau 91.13% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Hasil yang dicapai adalah jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya. Jumlah Anggaran Rp.10.851.654.440,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.881.059.275,- atau 91.06%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 107 ASN.
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, hasil yang dicapai adalah jumlah SPM yang diverifikasi. Jumlah Anggaran Rp.107.840.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.105.178.000,- atau 97.53%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 828 SPM.

- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan (Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun. Jumlah Anggaran Rp.13.463.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.456.600,- atau 99.95%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 3 dokumen. (Laporan Semester I, Laporan Semester II dan Laporan Keuangan SKPD)
- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah. Hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan sumber daya pengelola retribusi daerah. Jumlah Anggaran Rp.11.028.828,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.028.828,- atau 100.00% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah, Hasil yang dicapai adalah Jumlah Objek Retribusi. Jumlah Anggaran Rp.11.028.828,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.028.828,- atau 100.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 objek retribusi (Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan atau Pertokoan).
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase peningkatan kedisiplinan sumber daya aparatur. Jumlah anggaran Rp.39.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.704.050,- atau 96.18% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, hasil yang dicapai adalah jumlah dokumen kepegawaian. Jumlah anggaran Rp.39.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.704.050,- atau 96.18%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 7 dokumen (SKP, Dokumen Absensi ASN, Dokumen Berkala ASN, Dokumen Kenaikan Pangkat ASN, Dokumen KP4, Dokumen Pensiun ASN, Dokumen cuti, izin, sakit ASN)
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran. Jumlah anggaran Rp.1.317.138.970,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.1.240.844.650,- atau 94.21% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, hasil yang dicapai adalah Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan. Jumlah anggaran sebesar Rp.15.523.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.095.500,- atau 77.92%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 jenis. (Alat listrik dan Jasa instalasi listrik)
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket bahan logistik kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp.205.140.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.202.710.000,- atau 98.82%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 3 paket (Logistik, Makan minum rapat dan Makan minum aktivitas lapangan)
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, hasil yang dicapai adalah Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan. Jumlah anggaran sebesar Rp.335.632.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.288.230.100,- atau 85.88%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 3 jenis (Cetak, bahan persediaan benda berharga dan penggandaan)
- d. Penyediaan Bahan Material, hasil yang dicapai adalah Jumlah jenis bahan/material yang disediakan. Jumlah anggaran sebesar Rp.288.699.370,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.267.915.250,- atau 92.80%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 3 paket, (ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer)
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu, hasil yang dicapai adalah Jumlah tamu yang difasilitasi. Jumlah anggaran sebesar Rp.24.925.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.24.900.000,- atau 99.90%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 630 orang.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya. Jumlah anggaran sebesar Rp.447.218.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.444.993.800,- atau 99.50%.

Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 330 kali, baik perjalanan dinas dalam maupun luar daerah)

- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan peralatan dan mesin kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp.485.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.471.252.000,- atau 97.09% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, hasil yang dicapai adalah jumlah kendaraan dinas yang diadakan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.137.193.000,- atau 91.46%, sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 6 unit kendaraan dinas operasional roda dua.
 - b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan. Jumlah anggaran sebesar Rp.335.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp..334.059.000,- atau 99,60%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 28 unit (Laptop 5 unit, PC 7 unit, Printer 16 unit)
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran. Jumlah anggaran sebesar Rp.7.096.992.394,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.673.706.061,- atau 94.04% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket pengiriman. Jumlah anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.233.000,- atau 12.33%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 89 kali.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, hasil yang dicapai adalah Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik. Jumlah anggaran sebesar Rp.6.567.192.394,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.159.323.061,- atau 93.79%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 36 kali.

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, hasil yang dicapai adalah Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan. Jumlah anggaran sebesar Rp.519.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.513.150.000,- atau 98.72%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 jenis. (Jasa Tenaga kebersihan dan Jasa Tenaga Sopir) Jasa tenaga kebersihan mencakup biaya jasa rekanan/Pihak ketiga untuk mengelola kebersihan Kantor BPKPD, Pusat Pertokoan dan Gedung Pertemuan Masyarakat).
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur. Jumlah anggaran sebesar Rp.290.109.670,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.242.395.469,- atau 83.55% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, hasil yang dicapai adalah Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK. Jumlah anggaran sebesar Rp.167.013.670,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.134.680.469,- atau 80.64%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebesar 289 unit randis roda dua dan 3 unit randis roda empat.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Jumlah anggaran sebesar Rp.12.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.550.000,- atau 86.83%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 20 unit (Pemeliharaan AC, Laptop dan PC).
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah unit gedung yang direhab & luas gedung kantor yang dipelihara. Jumlah anggaran sebesar Rp.110.946.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.97.165.000,- atau 87.58%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 320 meter persegi (Pemeliharaan kanopi kantor, termite control, pemeliharaan Gedung pertemuan masyarakat, renovasi ruang area public (nursery room) dan ruang ramah anak.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Terlaksananya program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 4 (empat) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.122.542.396.619,- dapat terealisasi sebesar Rp117.482.670.907,- atau 95.87% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah tepat waktu. Jumlah Anggaran Rp.1.138.220.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.052.614.000,- atau 92.48% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok. Jumlah anggaran Rp.21.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.582.800,- atau 86.63%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 1 dokumen KUA dan dokumen PPAS
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan. Jumlah anggaran Rp.27.290.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.109.300,- atau 84.68%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 1 dokumen KUPA dan PPAS Perubahan.
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah anggaran Rp.36.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.36.054.200,- atau 99.53%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 34 dokumen RKA SKPD. Asistensi melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Verifikasi ini bertujuan menyesuaikan dokumen RKPD, PPAS, RKKBMD dan standar harga dengan RKA-SKPD.
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah anggaran Rp.36.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.36.139.950,- atau 99.77%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 34 dokumen RKA-P SKPD. Asistensi melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Verifikasi ini

bertujuan menyesuaikan dokumen P-RKPD, KUPA PPAS, RKKBMD Perubahan dan standar harga dengan RKA-P-SKPD.

- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah anggaran Rp.3.875.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.715.400,- atau 18.46%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 34 dokumen DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD yang di Asistensi. Jumlah anggaran Rp.5.255.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.043.850,- atau 95.98%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 34 dokumen DPPA SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan perbup tentang APBD. Jumlah anggaran Rp.512.350.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.472.676.400,- atau 92.26%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 dokumen yakni rancangan RAPBD dan Rancangan Perbup APBD.
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan perbup tentang APBD. Jumlah anggaran Rp.482.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.454.113.400,- atau 94.07%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 dokumen yakni rancangan RAPBD Perubahan dan Rancangan Perubahan Perbup APBD.
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, hasil yang dicapai adalah Jumlah standar biaya umum. Jumlah anggaran sebesar Rp.12.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.178.700,- atau 48.27%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 1 dokumen Standar Biaya Umum.

- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah. Jumlah Anggaran sebesar Rp.130.054.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.113.917.950,- atau 87.59% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen kas daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.18.533.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.053.000,- atau 81.22%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 4 dokumen (BKU, Register Penutupan Kas, Daftar Penyetoran ke Kas Daerah, Daftar Laporan Pengeluaran Daerah sesuai Sp2D)
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD. Jumlah anggaran sebesar Rp.16.860.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.350.000,- atau 91.04%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 dokumen (Palaporan RAK dan Dokumen SPD triwulan I, II, III dan IV).
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, hasil yang dicapai adalah Jumlah SKPD pengelola Dana DAK. Jumlah anggaran sebesar Rp.15.950.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.650.000,- atau 85.58%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 9 SKPD pengelola dana DAK (terlaksananya kegiatan forum group discussion (FGD) penyaluran tahap I s/d III).
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), hasil yang dicapai adalah Jumlah laporan. Jumlah anggaran sebesar Rp.23.290.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.965.100,- atau 77.14%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 6 dokumen (IWP 1%, IWP 8%, Rekening koran penerimaan dan pengeluaran, Sp2D, Register Sp2D, NTPN)

- e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, hasil yang dicapai adalah Jumlah berita acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi. Jumlah anggaran sebesar Rp.23.255.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.857.250,- atau 93.99%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 6 berita acara. (BE Rekonsiliasi Penerimaan, BA Rekonsiliasi DAK Fisik & Non Fisik), BA Rekonsiliasi Bank, BA Rekonsiliasi Register SP2D, BA Rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat, BA Rekonsiliasi DID)
 - f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota, hasil yang dicapai adalah Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat Waktu. Jumlah anggaran sebesar Rp.32.166.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.042.600,- atau 93.40%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebesar 100%. Terlaksananya kegiatan verifikasi SPM di 34 SKPD dengan tepat waktu.
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, hasil yang dicapai adalah Terlaksananya akuntansi dan tersusunnya pelaporan keuangan daerah yang disusun. Jumlah Anggaran sebesar Rp.283.175.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.245.071.200,- atau 86.54% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, hasil yang dicapai adalah jumlah laporan keuangan yang akuntabel. Jumlah anggaran sebesar Rp.18.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.632.500,- atau 95.83%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 laporan (Laporan Realisasi Penerimaan dan Laporan Realisasi Pengeluaran)
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis kabupaten. Jumlah anggaran sebesar Rp.43.125.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.41.877.400,- atau 97.11%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

Kabupaten serta 34 Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi. (Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan Semester II) dan (Laporan Realisasi APBD Semester Pertama Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya

- c. Koordinasi Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran, hasil yang dicapai adalah jumlah laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.24.325.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.843.650,- atau 98.02%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan 612 Laporan Realisasi Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD yang Terverisikasi sesuai Regulasi.
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT. Jumlah anggaran sebesar Rp.113.350.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.101.094.050,- atau 89.19%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 1 dokumen (Laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2020 un audited).
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, hasil yang dicapai adalah Jumlah rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD & jumlah rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Jumlah anggaran sebesar Rp.40.175.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.39.878.900,- atau 99.26%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 dokumen (Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
- f. Koordinasi, sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah pelaksanaan sidang majelis. Jumlah anggaran sebesar Rp.43.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.20.744.700,- atau 47.36%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 kali sidang majelis dan 50% penyelesaian kerugian daerah.

- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase keterpenuhan kegiatan penunjang urusan. Jumlah Anggaran sebesar Rp.120.990.947.119,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.116.071.067.757,- atau 95.93% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket alokasi dana penyaluran bantuan keuangan. Jumlah anggaran sebesar Rp.1.471.926.699,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00,00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebesar 00.00%.
 - b. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket alokasi dana penyaluran bantuan keuangan. Jumlah anggaran sebesar Rp.1.933.087.777,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 00,00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebesar 00.00%.
 - c. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, hasil yang dicapai adalah Jumlah paket alokasi dana penyaluran bantuan keuangan. Jumlah anggaran sebesar Rp.112.897.797.112,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.112.867.123.665,- atau 99.97%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebesar 100%.
 - d. Pengelolaan Dana Darurat, hasil yang dicapai adalah jumlah paket alokasi dana darurat dan mendesak. Jumlah anggaran sebesar Rp.2.113.580.939,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.629.389.500,- atau 29.78%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebesar 10%.
 - e. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, hasil yang dicapai adalah jumlah paket alokasi dana bagi hasil Kabupaten/Kota . Jumlah anggaran sebesar Rp.2.574.554.592,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.574.554.592,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebesar 100%.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Terlaksananya program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.1.120.135.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.785.796.052,- atau 70.15% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen pencatatan asset yang tepat dan benar. Jumlah Anggaran Rp.1.120.135.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.785.796.052,- atau 70.15% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Standar Harga, hasil yang dicapai adalah Jumlah buku standarisasi harga satuan barang dan jasa. Jumlah anggaran Rp.256.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.197.120.000,- atau 76.80%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 dokumen.
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah Jumlah titik penjagaan. Jumlah anggaran Rp.365.570.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.178.855.700,- atau 48.93% Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 40 aset pemda, 2 titik penjagaan dan 80% ratio pengamanan barang milik daerah
 - c. Penilaian Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen penilaian asset daerah. Jumlah anggaran Rp.104.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.62.394.100,- atau 59.54%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 dokumen.
 - d. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, Pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah. Jumlah anggaran Rp.70.115.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.44.277.500,- atau 63.15%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 1 dokumen pemindahtanganan barang milik daerah dan 4

dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

- e. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen barang milik daerah. Jumlah anggaran Rp.323.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 303.148.752,- atau 93.85%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 5 dokumen.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Terlaksananya program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 (satu) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.1.597.854.497,- dapat terealisasi sebesar Rp.1.491.112.058,- atau 93.32% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, hasil yang dicapai adalah Tercapainya target pajak dan retribusi daerah. Jumlah Anggaran Rp.1.597.854.497,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.491.112.058,- atau 93.32%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah peraturan perundang-undangan. Jumlah anggaran sebesar Rp.395.849.497,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.324.933.958,- atau 82.09%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 8 kecamatan dan 20 potensi pajak daerah.
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah pendampingan wajib pajak dan retribusi. Jumlah anggaran sebesar Rp.69.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.66.493.400,- atau 96.37%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 1 dokumen.
 - c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah, hasil yang dicapai adalah jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang digunakan dengan baik. Jumlah anggaran sebesar Rp.279.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

277.832.000,- atau 99.40%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 jenis.

- d. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi. Jumlah anggaran sebesar Rp.369.975.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.368.487.200,- atau 99.60%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 2 dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi dan 7 jenis obyek pajak dan retribusi yang dimutakhirkan.
- e. Penagihan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah persentase jumlah SPPT yang terdistribusi. Jumlah anggaran sebesar Rp.436.580.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.429.515.500,- atau 98.38%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 20.300 lembar SPPT dan 150.000 wajib pajak.
- f. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.46.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.100.000,- atau 50.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebanyak 1 dokumen.
- g. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, hasil yang dicapai adalah Persentase capaian target retribusi daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.750.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik triwulan IV sebesar 100%

B. Faktor- Faktor yang terkait Kinerja

a) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja antara lain :

1. Adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI)
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Komitmen dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan

5. Ketersediaan fasilitas baik peralatan maupun sistem yang terintegrasi antara e-Planning, e-Budgetting dan e-Monev
6. Tidak dipungut biaya pelayanan
7. Kesopanan, keramahan, Kecepatan dan Ketepatan jadwal pelayanan
8. Melakukan jemput bola, petugas turun di setiap kecamatan
9. Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas
10. Pencapaian yang baik atas sasaran Kinerja berdasarkan Tupoksi
11. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
12. Pelaksanaan kegiatan lebih awal, agar di akhir tahun data dapat tersaji lebih cepat.

b) Faktor penghambat Keberhasilan Kinerja

1. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah
2. Sering terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang besarannya tidak bersifat final.
3. Sering terjadinya perbedaan persepsi tentang implementasi ketentuan peraturan dengan aparaturnya pemeriksa
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi
5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan administrasi,
6. Penempatan pegawai tidak sesuai dengan latar belakang dan kualifikasi pendidikannya
7. Kurangnya keahlian pegawai,
8. Rendahnya kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah Daerah
9. Belum optimalnya manajemen pelaksanaan program/kegiatan strategis sehingga pencapaiannya cenderung belum efektif dan akuntabel

BAB II

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama dan membandingkan antara target dan realisasi.

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama dan membandingkan antara target dan realisasi.

SASARAN I MENINGKATNYA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

Bila dibandingkan dengan realisasi dengan target, maka sasaran ***Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah*** menunjukkan capaian sebesar 92,40% pada tahun 2021 dimana realisasi memenuhi beberapa kinerja yang ditargetkan sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbandingan target dan realisasi sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	Indeks (I)	8.49	11.52	135.68%
		Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	Indeks (I)	20	20	100%
		Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	Indeks (I)	13.91	14.72	105.82
		Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	Indeks (I)	15	10	66.67%
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)	Indeks (I)	3.68	*3,23	87.77
		Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	Indeks (I)	15	*15	100%
	Rata-rata Capaian					92,40%

*Nilai Realisasi merupakan nilai pengukuran IPKD tahun 2020

Rata-Rata capaian yang digunakan dengan nilai maksimal 100% (tidak mengakumulasi nilai over target).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Beberapa hal yang menyebabkan tercapai dan tidak tercapainya target indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah** pada tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)

Indeks ini merupakan alat untuk mengukur sejauhmana konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran baim dari segi kesesuaian jumlah Pagu Program dan Nomenklatur Program antara dokumen RPJMD, RKPD, PPAS dan APBD.

Pengukuran Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

URAIAN/INDIKATOR	TOTAL PROGRAM	JUMLAH PROGRAM YANG SESUAI	SKOR RATA-RATA	RATA-RATA x BOBOT/5)
Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS	212	212	1	3.00
Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD	212	212	1	3.00
Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS	212	197	0.92	2.79
Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD	212	193	0.91	2.73
JUMLAH			3.84	11.52
SKOR RATA-RATA			0.96	
INDEKS D1 SKOR RATA-RATA DIKALI BOBOT (BOBOT 12)				11.52

Target untuk indeks ini adalah sebesar 8.49 dan realisasi sebesar 11.52, Capaian menunjukan angka 135.68%.

Walaupun target pada Dimensi 1 ini tercapai, namun terdapat beberapa hal yang mempengaruhi dalam hal pencapaian target kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021, antara lain :

- Sumber daya manusia yang kurang paham tentang proses perencanaan
- Komitmen dari pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan.
- Penggunaan aplikasi yang terintegrasi sesuai tahapan mulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan APBD.
- Kebijakan dari pemerintah pusat.
- Penyesuaian dengan kebijakan atau peraturan yang diterbitkan setelah dokumen perencanaan sebelumnya telah ditetapkan.
- Adanya perubahan kondisi daerah yang menghancurkan adanya penyesuain Dokumen Penganggaran yang kurang sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Keterlambatan informasi tentang pagu defenitif transfer kedaerah tidak jarang diperoleh pemerintah daerah setelah proses perencanaan selesai dilaksanakan. Selain itu khusus DAK, menu setiap tahunnya berbeda-beda.

b. Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)

Indeks pengalokasian anggaran merupakan sejauh mana perhatian dan ketaatan pemerintah daerah untuk memenuhi beberapa amanat peraturan perundang-undangan (mandatory spending).

Target untuk indeks ini adalah sebesar 20 dan realisasi sebesar 20. Capaian menunjukkan angka 100%.

Tercapainya target pengalokasian anggaran belanja pada tahun 2021 adalah disebabkan beberapa hal :

- Besarnya perhatian pemerintah daerah untuk memenuhi mandatory spending adalah juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
- Ketaatan pemerintah pada Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pada tahun 2021 alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp. 409.110.770.323 atau 31.34% dari Total APBD.
- Ketaatan pemerintah daerah terhadap besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Pada Tahun 2021 alokasi Anggaran kesehatan sebesar Rp.323.275.739.004 atau 34.74% dari Total APBD (diluar gaji Non ASN)
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN). Pada tahun 2021 belanja infrastruktur sebesar Rp.422.867.204.643 atau 78.70% dari Total transfer ke daerah.
- Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pada tahun 2021 Alokasi ADD sebesar 13.06% dari dana Perimbangan.

c. Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)

Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah dalam hal memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi juga merupakan salah satu elemen kunci didalam good governance berupa penjaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan publik.

Pengukuran Dimensi Transparansi

No	Komponen	Ketepatan waktu						Total Skor
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	Rentan g Waktu (hari)	Sesuai / Tidak sesuai	Nila i	Keter aksesa n	
1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD	16 Agustus 2021	20 Agustus 2021	4	Sesuai	1	1	1
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran	10 September 2021	15 Septembe r 2021	5	Sesuai	1	1	1
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafond Anggaran	10 September 2021	15 Septembe r 2021	5	Sesuai	1	1	1
4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD	17 Desember 2020	17 Desember 2020	1	Sesuai	1	1	1
5	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	17 Desember 2020	17 Desember 2020	1	Sesuai	1	1	1
6	Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	17 Desember 2020	17 Desember 2020	1	Sesuai	1	1	1
7	Informasi Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	17 Desember 2020	17 Desember 2020	1	Sesuai	1	1	1
8	Informasi Ringkasan DPA SKPD	17 Desember 2020	17 Desember 2020	1	Sesuai	1	1	1
9	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah	31 Desember 2021	7 Januari 2022	7	Sesuai	1	1	1
10	Informasi Realisasi Belanja Daerah	31 Desember 2021	7 Januari 2022	7	Sesuai	1	1	1
11	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah	31 Desember 2021	7 Januari 2022	7	Sesuai	1	1	1

No	Komponen	Ketepatan waktu						Total Skor
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	Rentan g Waktu (hari)	Sesuai / Tidak sesuai	Nilai	Keteraksesan	
12	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD	31 Desember 2021	7 Januari 2022	7	Sesuai	1	1	1
13	Informasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	31 Desember 2021	31 Desember 2021	7 Januari 2022	Sesuai	1	1	1
14	Informasi Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	31 Desember 2021	31 Desember 2021	7 Januari 2022	Sesuai	1	1	1
15	Infomasi Ringkasan RKA Perubahan APBD	31 Desember 2021	31 Desember 2021	7 Januari 2022	Sesuai	1	1	1
16	Informasi Rencana Umum Pengadaan	31 Desember 2021	31 Desember 2021	7 Januari 2022	Sesuai	1	1	1
17	Informasi SK Kepala Daerah Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	8 Januari 2021	11 Januari 2021	3	Sesuai	1	1	1
18	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi	30 Desember 2020	5 Januari 2021	5	Sesuai	0	1	0.5
19	Informasi Laporan Arus Kas	17 Juni 2021	25 Juni 2021	8	Sesuai	1	1	1
20	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD	17 Juni 2021	25 Juni 2021	8	Sesuai	1	1	1
21	Informasi Neraca	17 Juni 2021	25 Juni 2021	8	Sesuai	1	1	1
22	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	17 Juni 2021	25 Juni 2021	8	Sesuai	1	1	1
23	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	17 Juni 2021	25 Juni 2021	8	Sesuai	1	1	1
24	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah				Sesuai	1	1	1
25	Infomasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	17 Juni 2021	25 Juni 2021	8	Sesuai	1	1	1
26	Informasi Opini BPK	27 Mei 2021	7 Juni 2021	11	Sesuai	1	1	1
Jumlah Skor						25	26	25.5
Rata-Rata						0.96	1	0.9808
Bila kolom Nilai Terisi 1 dan Keteraksesan Terisi 0, maka jumlah skor adalah 0,05								

No	Komponen	Ketepatan waktu						Total Skor
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	Rentan g Waktu (hari)	Sesuai / Tidak sesuai	Nilai	Keter aksesan	

Catatan

Ketepatan waktu penyajian diberikan nilai 1 jika informasi/dokumen keuangan daerah disajikan dalam situs jaringan resmi Pemda atau SIPD dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan

Keteraksesan. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen keuangan daerah yang diukur tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi Pemda atau SIPD dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya

INDIKATOR	SKOR		SKOR RATA-RATA
Ketepatan waktu	25/26	0.96	$\frac{(0.96+1)}{2}$ $= 0.9815$
Keteraksesan	26/26	1	
INDEKS D3 SKOR RATA-RATA x BOBOT	0.9815 x 15		14.72

Target untuk indeks ini adalah sebesar 13.91 dan realisasi sebesar 14.72. Capaian menunjukan angka 105.82%.

Tercapainya target transparansi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2021 adalah didukung beberapa hal :

- Konsistensi dan aksesibilitas penyajian laporan keuangan
- Komitmen Manajemen
- Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja
- Adanya sarana informasi publik online (via website) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

d. Penyerapan anggaran (Dimensi 4)

Indeks penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran merupakan salah satu bentuk tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan Bersama, evaluasi anggaran, penetapan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

Pengukuran Dimensi Penyerapan Anggaran

No	Indikator	Tahun 2021			
		Anggaran	Realissi	Persentase Penyerapan Anggaran	Skor
1	Penyerapan anggaran belanja operasional	892,903,337,683	787,199,766,806	88.16	1
2	Penyerapan anggaran belanja modal	296,886,314,251	211,655,462,253	71.29	0
3	Penyerapan anggaran belanja tidak terduga	2,113,580,939	629,389,500	29.78	0
4	Penyerapan anggaran belanja transfer	115,472,351,704	115,441,678,257	99.97	1
JUMLAH					2

catatan

Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% (>80%) maka skor diberi angka 1. Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% (<80%) maka skor diberikan angka 0

Skor Rata-Rata Indeks (D4) Tahun 2021	2/4	=	0.50
INDEKS D4 tahun 2021	0.50 x 20	=	10

Target untuk indeks ini adalah sebesar 15 dan realisasi sebesar 10 Capaian menunjukan angka 66.67%.

Tidak tercapainya target penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah disebabkan beberapa hal :

- Penyerapan anggaran belanja modal yang hanya 71.29% disebabkan karena tidak terealisasinya dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 35,353,816,750.- dan menyebabkan kegiatan fisik (belanja modal) yang sumber dananya dari program tersebut, tidak terealisasi atau tidak terlaksana. Sehingga tahapan kegiatan yang direncanakan pada APBD Tahun 2021 tidak sesuai. Disamping itu pemenuhan dokumen perjanjian program PEN termasuk izin

pelampauan devisit baru terbit akhir desember tahun 2021.

- Rendahnya penyerapan anggaran belanja tidak terduga disebabkan karena Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, suatu pengembalian atas kelebihan atau kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sulit untuk merealisasikan sesuai yang dianggarkan. Hal ini karena Belanja Tidak Terduga hanya diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya kebencanaan yang tentunya hal tersebut sulit diprediksikan.

e. Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, yang terdiri atas kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, sovabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka Panjang dan solvabilitas layanan).

Pengukuran Kondisi Keuangan Daerah

No	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021*	SKOR
1	Indeks Kondisi Keuangan Daerah	2.57	2.98	3.23	3.23	3.23
JUMLAH						3.23

Catatan

Indeks Rasio $i_n = \frac{(\text{Nilai actual pada penghitungan rasio} - \text{nilai minimal pada rasio tersebut})}{(\text{nilai maksimal} - \text{nilai minimal})}$
Indeks Rasio i_n diperoleh dari rata-rata indeks Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Data Indeks keuangan Daerah untuk tahun 2021 belum dapat diukur secara manual, karena harus menyandingkan dengan rasio masing-masing kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Nilai IPKD untuk tahun 2021 belum dapat ditentukan karena belum dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Target untuk indeks ini adalah sebesar 3.68 dan realisasi sebesar 3.23 (realisasi tahun 2020) Capaian menunjukkan angka 87.77%.

f. Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)

Pemberian Opini atas LKPD dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan opini atas LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, system pengendalian internal dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran Dimensi Opini BPK

No	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021*	SKOR
1	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	1
JUMLAH						1

catatan

Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 3 tahun berturut-turut akan diberikan skor 1, dua tahun berturut-turut diberikan skor 2/3, dan satu tahun diberikan skor 1/3

Skor Rata-Rata Indeks (D6) Tahun 2021	3/3	=	1
INDEKS D6 tahun 2021	1 x 15	=	15

Target untuk indeks ini adalah sebesar 15 dan realisasi sebesar 15 Capaian menunjukan angka 100%.

Adapun realisasi untuk indeks ini pada saat penyusunan LKj Tahun 2021 belum dapat dipastikan. Hal ini disebabkan karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 oleh BPK masih dalam tahap pemeriksaan (Hasil Audit diprediksi pada Bulan Mei 2022). Realisasi diatas merupakan nilai sementara yang diperoleh dari realisasi tahun 2020.

Pencapaian opini WTP oleh BPK dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- Kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan
- Kelemahan system pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja
- Kelemahan struktur pengendalian intern
- Kerugian daerah
- Potensi kerugian daerah
- Ketidakhematan
- Ketidakefektifan

⇔ Capaian Kinerja :

Indeks Keseuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, indeks Pengalokasian Anggaran, Indeks Transparansi, Indeks Penyerapan Anggaran, Indeks Kondisi Keuangan Daerah dan Indeks Opini BPK terdapa LKPD

⇔ Penyebab keberhasilan/ kegagalan

1. Komitmen dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan
2. Adanya target Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
3. Ketersediaan fasilitas baik peralatan maupun sistem yang mulai terintegrasi melalui aplikasi SIPD

⇔ Kendala – kendala Yang di hadapi serta Solusi

1. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah
2. Sering terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang besarannya tidak bersifat final.
3. Sering terjadinya perbedaan persepsi tentang implementasi ketentuan peraturan dengan aparatur pemeriksa
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi
5. Terlambatnya penyusunan Renstra SKPD
6. Seringnya terbit pemutakhiran terhadap peraturan yang baru saja mulai diterapkan

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

1. Menentukan target kinerja yang terukur dan logis
2. Menyiapkan dan menyimpan kelengkapan dokumen dengan baik
3. Melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk e-SAKIP.
4. Mengakomodir kebutuhan SDM berlatar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi
5. Senantiasa menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan berikut pemutakhirannya.
6. Tetap mengoptimalkan konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran

MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH

Pada sasaran *meningkatnya Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah* bila dibandingkan dengan target, maka tercapai realisasi dengan persentase capaian sebesar 100% pada tahun 2021 dimana realisasi memenuhi kinerja yang ditargetkan sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi sasaran II Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	- Persentase Peningkatan Asli Daerah	Persentase	1%	2%	200%
		- Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Predikat	Baik	Baik	100%
Rata-rata Capaian						100%

Beberapa hal yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran *Meningkatnya Pendapatan Daerah* pada tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase Peningkatan Asli Daerah

Adanya peningkatan realisasi penerimaan setiap jenis Pajak pada tahun 2021, antara lain Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Walaupun beberapa jenis pajak tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena adanya kebijaksanaan pemerintah dalam hal pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran akibat pandemic covid-19. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan.

Pengukuran Persentase Pendapatan Asli Daerah

No	INDIKATOR	REALISASI PAD TAHUN	
		2020(Rp.)	2021 (Rp.)
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah	151.857.742.474.87	155.470.054.144.9
Rumus		PAD Tahun n- PAD TAHUN lalu/ PAD Tahun lalu	
Nilai Persentase PAD		$\frac{155.470.054.144 - 151.875.742.474}{151.857.742.474} \times 100\%$	
		0.02	

Target untuk indeks ini adalah sebesar 1% dan realisasi sebesar 2% Capaian menunjukan angka 200%.

Pencapaian target persentase Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- Adanya reward and punishment
- Adanya beberapa potensi pajak daerah
- Penyederhanaan proses bisnis
- Adopsi teknologi tepat guna
- Laik penyebaran informasi

- b. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selaku unit penyelenggara pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini merupakan langkah rutin untuk menjaga dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan serta untuk membangun kepercayaan terhadap penyelenggara pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan.

Harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan adalah mendapatkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Pelayanan Pajak Daerah dan retribusi Daerah berkewajiban memberikan pelayanan prima sesuai dengan janji dan standar pelayanan, serta menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan SKP yang memenuhi kenyamanan dan keinginan pengguna layanan.

Target untuk indikator ini adalah predikat BAIK dan realisasi dengan nilai 83,78 atau predikat BAIK. Capaian menunjukan angka 100%.

Pencapaian target Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- Adanya perbaikan mutu layanan
- Adanya Penyederhanaan proses bisnis
- Kewajaran biaya/tarif penanganan pengaduan
- Tanpa gratifikasi
- Adanya aplikasi yang memudahkan layanan perpajakan

Sasaran 2 = Meningkatnya Pendapatan Daerah

⇔ Capaian Kinerja :

Meningkatnya pendapatan asli daerah

⇔ Penyebab keberhasilan/ kegagalan

1. Peningkatan layanan
2. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
3. Adanya reward and punishment
4. Adanya aplikasi yang memudahkan layanan
5. Adanya aturan yang mengikat warga untuk membayar pajak

⇔ Kendala – kendala Yang di hadapi serta Solusi

1. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah
2. kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah
3. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang Pajak daerah
4. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.
5. kelemahan kualitas SDM aparatur
6. Potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Rokok.
7. Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
8. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas proses pelayanan pendaftaran khususnya dalam hal Entry Data, meningkatkan level verifikasi dan penambahan tenaga petugas pendaftaran PBB.
2. Melakukan integrasi data dengan pihak-pihak terkait untuk memudahkan proses entry data.
3. Melakukan pembekalan budaya pelayanan prima kepada Loker Layanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Penyampaian himbauan kepada masyarakat untuk melaporkan bilamana ada ketidaksesuaian data pada SPPT yang terbit untuk dimutakhirkan.
5. Menambah personil pada pengelolaan pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan

b. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

⇔ Capaian Kinerja :

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan retribusi Daerah

⇔ Penyebab keberhasilan/ kegagalan

1. Komitmen dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan
2. Ketersediaan fasilitas baik peralatan maupun sistem yang terintegrasi dengan baik dalam pelayanan Pajak
3. Adanya peraturan yang mengikat tentang Pajak dan retribusi daerah
4. Penentuan target Pajak dan retribusi yang tepat

⇔ Kendala – kendala Yang di hadapi serta Solusi

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pelayanan pajak
2. Adanya pandemic covid-19 yang membatasi wajib pajak untuk berinteraksi secara langsung pada loket pembayaran
3. Masih terbatasnya pembayaran pajak via online

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

1. Tetap memperhatikan protocol Kesehatan pada pelayanan pajak secara langsung
2. Mengakomodir kebutuhan SDM berlatar belakang pendidikan pajak daerah
3. Mengembangkan layanan pajak berbasis online
4. Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.
5. Menyusun perda baru untuk merespon dimungkinkannya penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.
6. Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan yang disusun oleh pemerintah daerah dengan dilahirkannya perda baru yang memayungi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi Interna lTriwulan IV Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021. Secara umum tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga target Kinerja ***“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah, Meningkatnya Pendapatan Daerah, dan Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng”*** dapat dimaksimalkan pencapaiannya. Pencapaian ini didukung dengan kinerja Fisik sebesar 96.31% dan Pencapaian Realisasi Keuangan sebesar 95.16%. Berdasarkan kerangka pengukuran indikator dapat disimpulkan bahwa Rata-Rata tingkat pencapaian realisasi kinerja untuk ketiga sasaran tersebut adalah **95.44%** dengan kategori pencapaian ***“sangat tinggi”***.

Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun anggaran 2021 juga terdapat permasalahan yang mengakibatkan realisasi tidak mencapai target. Secara umum hal ini disebabkan karena :

1. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.
2. Pemerintah Daerah masih mengandalkan keuangan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
3. Belum mampu menggali dan mempertahankan sumber daya daerah, dan
4. Masih banyak pengalokasian dana untuk belanja rutin.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng telah melakukan serangkaian program dan kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan agar hambatan/kendala selama pelaksanaannya dapat teratasi dengan baik dan lancar, solusinya antara lain adalah :

1. Tetap mengupayakan melaksanakan reward and punishment untuk lingkup eksternal dan lingkup internal Bdan Pengelolaan keuangan yang secara nyata telah bermanfaat dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja.
2. Mengoptimalkan dan menggali Sumber Daya Daerah untuk meningkatkan pendapatan guna mendukung proses pembangunan daerah.
3. Meningkatkan Sistem Pengendalian Interen dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan.
4. Membuat Analisis Resiko pada kegiatan yang dianggap prioritas dan diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan masyarakat.
5. Pengukuran Tata Kelola keuangan yang terukur dan logis melalui pengukuran setiap dimensi, dapat dijadikan pertimbangan dan data pembanding dalam pengambilan kebijakan terkait bidang keuangan pada tahun-tahun berikutnya

Dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 ini harapannya kedepan akan lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian evaluasi internal ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Laporan Evaluasi Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* .

Watansoppeng, Januari 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG**

Drs. H. DIPA. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680102 199603 1 005

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2021
TRIWULAN IV
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,795,000.00	7,795,000.00	100.00%	7,795,000.00	100.00%	0.01%	7,187,900.00	92.21%	Tidak Ada	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14,705,000.00	12,955,000.00	100.00%	12,955,000.00	100.00%	0.01%	12,919,650.00	99.73%	Tidak Ada	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,830,000.00	13,310,000.00	100.00%	13,310,000.00	100.00%	0.01%	13,200,000.00	99.17%	Tidak Ada	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,800,000.00	11,800,000.00	100.00%	11,800,000.00	100.00%	0.01%	11,646,150.00	98.70%	Tidak Ada	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,599,245,764.00	10,851,654,440.00	100.00%	10,851,654,440.00	100.00%	7.46%	9,881,059,275.00	91.06%	Tidak Ada	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118,340,000.00	107,840,000.00	100.00%	107,840,000.00	100.00%	0.07%	105,178,000.00	97.53%	Tidak Ada	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13,463,000.00	13,463,000.00	100.00%	13,463,000.00	100.00%	0.01%	13,456,600.00	99.95%	Tidak Ada	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										
5.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	2,054,353.00	11,028,828.00	100.00%	11,028,828.00	100.00%	0.01%	11,028,828.00	100.00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39,200,000.00	39,200,000.00	100.00%	39,200,000.00	100.00%	0.03%	37,704,050.00	96.18%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,523,500.00	15,523,500.00	100.00%	15,523,500.00	100.00%	0.01%	12,095,500.00	77.92%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143,565,000.00	205,140,000.00	100.00%	205,140,000.00	100.00%	0.14%	202,710,000.00	98.82%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	324,982,500.00	335,632,500.00	100.00%	335,632,500.00	100.00%	0.23%	288,230,100.00	85.88%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	248,699,370.00	288,699,370.00	100.00%	288,699,370.00	100.00%	0.20%	267,915,250.00	92.80%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,425,000.00	24,925,000.00	100.00%	24,925,000.00	100.00%	0.02%	24,900,000.00	99.90%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168,648,600.00	447,218,600.00	100.00%	447,218,600.00	100.00%	0.31%	444,993,800.00	99.50%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	150,000,000.00	100.00%	150,000,000.00	100.00%	0.10%	137,193,000.00	91.46%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270,100,000.00	335,400,000.00	100.00%	335,400,000.00	100.00%	0.23%	334,059,000.00	99.60%	Tidak Ada	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	10,000,000.00	100.00%	0.01%	1,233,000.00	12.33%	Tidak Ada	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik	6,512,047,027.00	6,567,192,394.00	100.00%	6,567,192,394.00	100.00%	4.51%	6,159,323,061.00	93.79%	Tidak Ada	

5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519,800,000.00	519,800,000.00	100.00%	519,800,000.00	100.00%	0.36%	513,150,000.00	98.72%	Tidak Ada	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117,209,150.00	167,013,670.00	100.00%	167,013,670.00	100.00%	0.11%	134,680,469.00	80.64%	Tidak Ada	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,050,000.00	12,150,000.00	100.00%	12,150,000.00	100.00%	0.01%	10,550,000.00	86.83%	Tidak Ada	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19,946,000.00	110,946,000.00	100.00%	110,946,000.00	100.00%	0.08%	97,165,000.00	87.58%	Tidak Ada	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	10,550,000.00	21,450,000.00	100.00%	21,450,000.00	100.00%	0.01%	18,582,800.00	86.63%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	11,115,000.00	27,290,000.00	100.00%	27,290,000.00	100.00%	0.02%	23,109,300.00	84.68%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	29,225,000.00	36,225,000.00	100.00%	36,225,000.00	100.00%	0.02%	36,054,200.00	99.53%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	18,725,000.00	36,225,000.00	100.00%	36,225,000.00	100.00%	0.02%	36,139,950.00	99.77%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3,875,000.00	3,875,000.00	100.00%	3,875,000.00	80.00%	0.00%	715,400.00	18.46%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5,255,000.00	5,255,000.00	100.00%	5,255,000.00	100.00%	0.00%	5,043,850.00	95.98%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	502,375,000.00	512,350,000.00	100.00%	512,350,000.00	100.00%	0.35%	472,676,400.00	92.26%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	474,000,000.00	482,750,000.00	100.00%	482,750,000.00	100.00%	0.33%	454,113,400.00	94.07%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8,550,000.00	12,800,000.00	100.00%	12,800,000.00	100.00%	0.01%	6,178,700.00	48.27%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	15,033,000.00	18,533,000.00	100.00%	18,533,000.00	100.00%	0.01%	15,053,000.00	81.22%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16,860,000.00	16,860,000.00	100.00%	16,860,000.00	100.00%	0.01%	15,350,000.00	91.04%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	10,650,000.00	15,950,000.00	100.00%	15,950,000.00	100.00%	0.01%	13,650,000.00	85.58%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	23,290,000.00	23,290,000.00	100.00%	23,290,000.00	100.00%	0.02%	17,965,100.00	77.14%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	23,255,000.00	23,255,000.00	100.00%	23,255,000.00	100.00%	0.02%	21,857,250.00	93.99%	Tidak Ada	

5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32,166,500.00	32,166,500.00	100.00%	32,166,500.00	100.00%	0.02%	30,042,600.00	93.40%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	18,400,000.00	18,400,000.00	100.00%	18,400,000.00	100.00%	0.01%	17,632,500.00	95.83%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	38,925,000.00	43,125,000.00	100.00%	43,125,000.00	100.00%	0.03%	41,877,400.00	97.11%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19,075,000.00	24,325,000.00	100.00%	24,325,000.00	100.00%	0.02%	23,843,650.00	98.02%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	113,350,000.00	113,350,000.00	100.00%	113,350,000.00	90.00%	0.07%	101,094,050.00	89.19%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	27,480,000.00	40,175,000.00	100.00%	40,175,000.00	100.00%	0.03%	39,878,900.00	99.26%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	43,800,000.00	43,800,000.00	100.00%	43,800,000.00	50.00%	0.02%	20,744,700.00	47.36%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	17,680,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	13,940,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
5.02.02.2.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	0.00	1,471,926,699.00	100.00%	1,471,926,699.00	80.00%	0.81%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0.00	1,933,087,777.00	100.00%	1,933,087,777.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	Tidak Ada	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	114,425,973,500.00	112,897,797,112.00	100.00%	112,897,797,112.00	100.00%	77.58%	112,867,123,665.00	99.97%	Tidak Ada	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,113,580,939.00	2,113,580,939.00	100.00%	2,113,580,939.00	40.00%	0.58%	629,389,500.00	29.78%	Tidak Ada	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2,582,540,470.00	2,574,554,592.00	100.00%	2,574,554,592.00	100.00%	1.77%	2,574,554,592.00	100.00%	Tidak Ada	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah										
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	56,650,000.00	256,650,000.00	100.00%	256,650,000.00	100.00%	0.18%	197,120,000.00	76.80%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	436,020,000.00	365,570,000.00	100.00%	365,570,000.00	100.00%	0.25%	178,855,700.00	48.93%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	34,800,000.00	104,800,000.00	100.00%	104,800,000.00	100.00%	0.07%	62,394,100.00	59.54%	Tidak Ada	

5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70,115,000.00	70,115,000.00	100.00%	70,115,000.00	90.00%	0.04%	44,277,500.00	63.15%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	302,850,000.00	323,000,000.00	100.00%	323,000,000.00	100.00%	0.22%	303,148,752.00	93.85%	Tidak Ada	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	278,482,523.00	395,849,497.00	100.00%	395,849,497.00	100.00%	0.27%	324,933,958.00	82.09%	Tidak Ada	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	69,875,000.00	69,000,000.00	100.00%	69,000,000.00	100.00%	0.05%	66,493,400.00	96.37%	Tidak Ada	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0.00	279,500,000.00	100.00%	279,500,000.00	100.00%	0.19%	277,832,000.00	99.40%	Tidak Ada	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	369,450,000.00	369,975,000.00	100.00%	369,975,000.00	100.00%	0.25%	368,487,200.00	99.60%	Tidak Ada	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	279,130,000.00	436,580,000.00	100.00%	436,580,000.00	100.00%	0.30%	429,515,500.00	98.38%	Tidak Ada	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	6,850,000.00	46,200,000.00	100.00%	46,200,000.00	100.00%	0.03%	23,100,000.00	50.00%	Tidak Ada	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	4,650,000.00	750,000.00	100.00%	750,000.00	100.00%	0.00%	750,000.00	100.00%	Tidak Ada	
		150,720,971,196	145,519,073,418	100.00%	145,519,073,418		97.57%	138,481,157,650	95.16%		



